

**BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI**
NOMOR : 01 / PPID KP / 2018

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di ruang rapat Binangun IV A Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NO	NAMA	INSTANSI	UNSUR
1	Drs. Rudiyatno, M.M	Dinas Kominfo	PPID Kabupaten Kulon Progo
2	R. Sigit Purnomo, S.IP	Dinas Kominfo	PPID Kabupaten Kulon Progo
3	Heri Widada, S.IP	Dinas Kominfo	PPID Kabupaten Kulon Progo
4	Susilo, S.IP, M.Si.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PPID Pembantu
5	Suhardiyati,S.KM.	Dinas Kesehatan	PPID Pembantu
6	Tumirah Rahayu, S.IP.	Dinas Perdagangan	PPID Pembantu
7	Ngatini, S.H	Dinas Dukcapil	PPID Pembantu
8	Nur Sigit Basri S, S.SiT	Sekretariat Daerah Kulon Progo	PPID Pembantu
9	R. Agus Sutopo, A.Md.	BKPP	PPID Pembantu
10	Okti Putri Nastiti, SE	BKAD	PPID Pembantu
11	Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.	Bappeda	PPID Pembantu
12	Sulalita Saraswati, S.ST.	RSUD Wates	PPID Pembantu

Berdasarkan Pasal 17 UU KIP telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi dan data bahwa Informasi/data yang dikecualikan dari :

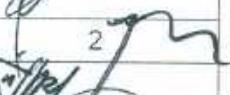
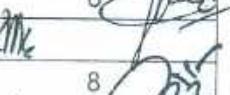
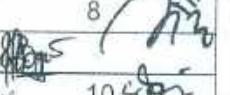
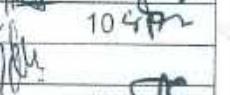
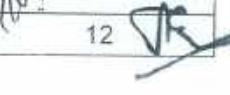
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
4. Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
6. Sekretariat Daerah Kulon Progo
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kulon Progo
8. BKAD Kulon Progo
9. BAPPEDA Kulon Progo
10. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo

Menyatakan bahwa informasi/data dari instansi tersebut diatas digolongkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dengan alasan *terlampir*.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk diajukan sebagaimana mestinya.

Wates, 4 Mei 2018

Pengujи :

1	Drs. Rudiyatno, M.M	1. 
2	R. Sigit Purnomo, S.IP	2 
3	Heri Widada, S.IP.	3 
4	Susilo, S.IP, M.Si.	4 
5	Suhardiyati,S.KM.	5 
6	Tumirah Rahayu, S.IP.	6 
7	Ngatini, S.H	7 
8	Nur Sigit Basri S, S.SiT	8 
9	R. Agus Sutopo, A.Md.	9 
10	Okti Putri Nastiti, SE	10 
11	Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.	11 
12	Sulalita Saraswati, S.ST.	12

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PPID KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR : 01/PPIDKP/2018
 TANGGAL : 4 Mei 2018

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

D	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
3	4	5	6	7		
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H Tentang KIP					
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H angka 1 Tentang KIP					
a. Biodata Pegawai	- UU Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepergawaiian jo. - UU. Nomor 43 tahun 1999	- Selama yang bersangkutan menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia - Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data infomasi yang		

				bersangkutan
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobahan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf H Angka 2 Tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Hingga pasien meninggal dunia - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi daftar informasi publik pasien yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi
a. Data rekam medis pasien rumah sakit/poliiklinik	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 57 Tentang Kesehatan - UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - PP No. 26 Th. 1977 Tentang Pengujian Kesehatan PNS - Permenkes Nomor 269 Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf Tahun 2008 Tentang Rekam Medis - Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 tahun 2010 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan
b. Hasil Uji Kesehatan Pegawai	- PP No. 26 tahun 1977 Tentang Pengujian Kesehatan PNS			

				stigmanisasi
c. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling	- Peratturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Jabatan Struktural	- Selama menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
d. Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	- Peraturan Kepala BKN No. 11 Tahun 2008 ttg Pedoman Penilaian Kompetensi PNS	- Selama menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	- Menjaga suasana konusif di lingkungan kerja
3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan Rekening bank seseorang	- Pasal 17 huruf h angka 3 UU no.14 Tahun 2008 Tentang KIP			
a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	- Kepmendagri Tematang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	- Sampai audit selesai	- Belum terjaminnya kebenaran informasi	- Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos
b. Kode PIN Rekening Bank Pegawai	- UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE Pasal 1 angka 6	- Selama kode masih digunakan	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Menjaga keamanan rekening Bank
4. Hasil-hasil Evaluasi i sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	- UU no.14 Pasal 17 huruf H angka 4 Tahun 2008 Tentang KIP			

a. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	- PP No. 9 Th. 2003 ttg Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai	- Sampai diterbitkannya SK	- Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
b. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- PP nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	- Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	- Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia(SR) dan rahasia (R) dan Kofidensial	- Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas di Prov. DIY, - Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Diras di Lingkungan Pemerintah Daerah	- Hingga proses surat tersebut selesai	- Menghambat kebijakan Pimpinan, - Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja - Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa
Rincian Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	- Perpres Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa pasal 6 Dengan perubahannya perpres Nomor 4 Tahun 2015	- Selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya	- Menimbulkan persaingan yang kurang sehat	- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

4	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa	- Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa pasal 6 Dengan perubahannya perpres nomor 4 tahun 2015	- Selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya	- Muncul persaingan tidak sehat	- Dapat menjaga objektivitas penilaian
5.	Identitas POKJA ULP	Perpres Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa pasal 6 Dengan perubahannya perpres nomor 4 tahun 2015	- Selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya	- Muncul persaingan tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian dan mencegah intervensi dari pihak lain
6	Kode Akses elektronik aplikasi	- UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 6 Tentang ITE	- Selama kode masih digunakan	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
7	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	- UU No.14 Pasal 17 huruf J Tahun 2009 Tentang KIP	- Sesuai peraturan perundangan yang berlaku	- Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
8	Data Pasien HIV/AIDS	Perda Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

		Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi	
	Dokumen kependudukan yang meliputi :	<p>UU Nomor 23/2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan pasal 79 dan 84;</p> <p>- PP 37 th 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 56-60</p>	<p>Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi ybs
1	Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Angka Importir	<p>Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama menjadi Wajib Pajak - Apabila mendapat persetujuan Wajib Pajak - Diperlukan untuk kepentingan Pengadilan 	<p>Mengetahui rahasia Perusahaan yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga privasi Perusahaan
2	Mediasi perselisihan Hubungan Industrial	<p>UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyelesaian Perselisihan</p>	<p>Merugikan yang bersangkutan karena merupakan Rahasia Negara</p> <p>Dapat mengungkap data para pihak yang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga Rahasia yang bersangkutan - Industrian yang kondusif

		Hubungan Industrial		berselisih yang bersifat rahasia	
13	Hasil studi audit menara telekomunikasi	UU No.36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi	Sampai hasil studi tersebut selesai diverifikasi oleh instansi terkit	Dapat menimbulkan bias informasi	Melindungi penyalaugunaan informasi
14	Izin Perceraian PNS	UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Perkawinan -SE Walikota No. 472/016/SE/2010 Tentang Izin Perkawinan/Perceraian PNS	Proses perizinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Pihak luar campur tangan	Kelancaran proses perceraian
15	SPJ, SPM, SPP, SP2D	- UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, - UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Masa pelaksanaan pekerjaan	Mengungkap data ketidakwajaran	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan
16	1. KTP 2. KK 3. Sertifikat Tanah	UU Nomor 23 Pasal 64 ayat 3 Tahun 2006	Selama masih berlaku	Mengungkap data pribadi	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data
17	Data Aplikasi MDK (Pemutakhiran Data Keluarga) by name by address	UU Nomor 52 Tahun 2009	Yang bersangkutan meninggal dunia	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
18	Informasi mengenai Data Korban Kekerasan dan	UU Nomor 22 Tahun 2003 mengenai Hak-hak Perlindungan	Selamanya	Mengungkapkan data Korban/Pelapor yang	Menjaga privasi dan keamanan Korban dari hal-

	Pelaporan Seksual pada anak	Anak	menjadi Rahasia	hal yang tidak diinginkan seperti: ancaman, dkk
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	- Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No 5 Tahun 2006 Peraturan Mendagri No 51 Tahun 2010	Mendapat persetujuan Pihak yang Berwenang	Rekomendasi/Pernyataan yang dimuat dalam LHP dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola
4	Laporan pemeriksaan oleh tim Auditor (Bank Indonesia/OJK/Akuntan Publik)	UU Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ayat 33	Tidak terbatas	Menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya
5	Data EX Tapol G 30 S/PKI	Intruksi Mendagri No. 32 Tahun 981	Sampai terbitnya Regulasi Baru Sampai terbitnya Regulasi Baru	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia
6	Dokumen pertahanan	UU Pertanahan No. 10 Th. 1960	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat
7	Hukuman Disiplin Pegawai	PP NO. 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai	Selama pemilikan tidak berubah	Penyalahgunaan kewenangan
8	Data KK dan penduduk miskin	- Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Kemiskinan	- Disesuaikan Jenis Hukuman disiplinnya	Menjaga kerahasiaan pegawai
9			- Selama masuk dalam Album Kemiskinan	-Menjaga privasi -melindungi dari

	KIP		bersifat rahasia	penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
Data Pencari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia - Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Bila pencari kerja telah mendapatkan pekerjaan 	<p>Rawan Trafficking karena lembaga penyiar langsung mendatangi pencari kerja</p>	Pengguna tenaga kerja akan menggunakan proses penempatan tenaga kerja sesuai prosedur
Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama proses mediasi sampai dengan memperoleh ketetapan hukum tetap 	Dapat mengungkap data para pihak yang berselisih yang bersifat rahasia	<p>Menjaga suasana Hubungan Industrial yang kondusif</p>
Status sosial calon transmigran	<ul style="list-style-type: none"> - Ps.35B dan 35D UU No. 29 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> - Tak terbatas sebelum ada perubahan atas Peraturan Per Undang-undangan 	Mengungkap data pribadi calon transmigran	Melindungi data pribadi calon transmigran

28	Pemasalahan transmigran di lokasi	- UU Nomor 29 Pasal 35 huruf B dan Pasal 35 huruf D Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian	Tak terbatas sebelum ada perubahan atas Peraturan Per Undang-undangan	Dapat menimbulkan kegelisahan / kegusaran calon transmigrasi	Menghindari gejolak baik di daerah asal maupun daerah transmigrasi
----	-----------------------------------	--	---	--	--



Drs. RUDIYATNO, M.M.
NIP. 196307201993031005